

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
DEPUTI PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN

NOTA DINAS

Nomor: 244/PP.08/VI/2022

Yth : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan
Dari : Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan
Hal : Penyampaian LAKIP Unit Kerja Dejiandra
Tanggal : 21 Juni 2022

1. Dasar:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
 - c. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Setjen Wantannas Nomor 448/PR.03/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 perihal Tindak Lanjut atas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja 2021.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Dejiandra (LAKIP) Tahun 2021 (terlampir).
3. Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Jiandra,

Gregorius Agung, W.D., M.Tr(Han)
Laksamana Muda TNI

Tembusan:

1. Sesjen Wantannas (sebagai laporan)
2. Para Deputi Setjen Wantannas
3. Para Kepala Biro Setjen Wantannas



LAPORAN KINERJA

UNIT KERJA KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I	1
2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
2.2 Maksud dan Tujuan.....	3
2.3 Tugas dan Fungsi Unit Kerja	3
2.4 Struktur Unit Kerja	3
2.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	4
BAB II.....	7
2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	7
2.2 VISI WANTANNAS	8
2.3 MISI WANTANNAS.....	8
2.4 TUJUAN WANTANNAS	9
2.5 SASARAN STRATEGIS.....	9
2.6 RENCANA STRATEGI DEPUTI PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN 2020-2024...	10
2.7 PERJANJIAN KINERJA 2021.....	11
BAB III.....	13
3.1 CAPAIAN KINERJA	13
3.1.1 Meningkatnya kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional bidang pengkajian dan penginderaan	13
3.1.2 Meningkatnya validitas dan kehandalan kebijakan dan strategi bidang pengkajian dan penginderaan	18
3.1.3 Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	18
3.1.4 Realisasi Anggaran Deputi Pengkajian dan Penginderaan Tahun 2021	19
BAB IV	19
PENUTUP.....	19

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-NYA kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit kerja Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

LAKIP merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dan anggaran suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari APBN/APBD dalam rangka mencapai target/sasaran strategis suatu instansi. LAKIP merupakan suatu laporan yang pada intinya berisikan suatu sinergitas dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang sejalan/selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap unit/bagian diwajibkan untuk melaporkan setiap realisasi anggaran atas pelaksanaan program dan seberapa besar kinerja dan anggaran yang dihasilkan/terlaksana di dalam ukuran satuan jumlah ataupun persentase. Kegiatan ini sebagai wujud pelaksanaan suatu akuntabilitas yang baik dan sebagai bahan evaluasi terhadap unit kerja yang bersangkutan selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

Unit kerja Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan (Dejiandra) menyampaikan LAKIP Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan capaian anggaran Tahun 2021 dari target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja Dejiandra Tahun 2021. LAKIP Dejiandra Tahun 2021 memberikan gambaran seberapa mampu Unit Kerja Dejiandra di dalam mengatasi permasalahan dan hambatan serta solusi/rekomendasi akan permasalahan dan hambatan. Substansi yang dilaporkan di dalam LAKIP ini memberikan informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja dan capaian anggaran Dejiandra Tahun 2021 dan juga melaporkan tentang capaian target yang terlaksana dan juga kinerja yang masih belum tercapai. Adapun laporan perihal capaian target kinerja dan anggaran yang terlaksana, besarnya capaian dan kendala yang dihadapi tertuang di dalam analisis terhadap capaian pada setiap kegiatan.

LAKIP Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan Tahun 2021 ini disusun atas kerja sama dari semua pelaksana program kegiatan Bidang Kedeputian Jiandra. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan juga informasi bagi peningkatan akuntabilitas kinerja dan anggaran dan juga perbaikan organisasi menuju suatu birokrasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Kami juga menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi jika ada saran atau kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, Januari 2022

Deputi Pengkajian dan Penginderaan,



Gregorius Agung, W.D., M.Tr (Han)
Laksamana Muda TNI

**LAPORAN KINERJA
DEPUTI PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Di dalam rangka meningkatkan suatu akuntabilitas pada suatu instansi Pemerintahan, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur yang utama. Suatu akuntabilitas menjadi kunci utama tata kelola pemerintah yang baik jika dijalankan secara baik dan juga berkala. Selain itu guna mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, mampu melayani publik, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) telah melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas diwujudkan dengan menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahun serta setiap unit menyusun laporan periodik kinerja, yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Nomor Kep-84/Sesjen/XII/2013 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Setjen Wantannas. Tak terkecuali Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan (Dejiandra) juga telah menyusun LAKIP sebagai bentuk akuntabilitas kinerja unit.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dejiandra ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan kinerja Dejiandra dan menilai hasil pelaksanaannya. Pada setiap kegiatan telah dilakukan dengan perencanaan yang baik serta pelaksanaannya dilakukan secara tertib, kontinyu dan konsisten, sehingga dapat diperoleh gambaran yang obyektif dan lengkap tentang pencapaian target kinerja Dejiandra. Untuk tahun 2021 terdapat tugas tambahan dari Pimpinan untuk melakukan kajian terhadap isu-isu yang harus segera diberikan saran dan tindakan kepada Kementerian/lembaga dan telah diselesaikan dengan baik dan

lancar. Dengan demikian target kinerja melebihi dari keseluruhan target perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dejiandra Tahun 2021.

2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dejiandra adalah salah satu unit kerja pada Setjen Wantannas yang mempunyai tugas membantu Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis perumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Setjen Wantannas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Sedangkan Wantannas yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Peran, tugas dan fungsi Setjen Wantannas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah Setjen Wantannas berperan sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang membantu Presiden sebagai Ketua Wantannas dalam melaksanakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional, sedangkan salah satu tugasnya adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan fungsinya adalah:

1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan
3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Dilihat dari fungsinya, Setjen Wantannas dalam menjalankan tugas utamanya secara garis besar memiliki 3 inti kegiatan atau pilar lembaga Setjen Wantannas, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan;
2. Menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan
3. Menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

2.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dejiandra tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Sesjen Wantannas atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan serta monitoring dan evaluasi secara berkala/periodik dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dan anggaran Dejiandra selama tahun 2021 kepada pimpinan lembaga.

2.3 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Dejiandra mempunyai tugas membantu Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis perumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Dejiandra menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Penyiapan dan penyelenggaraan pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional, dan internasional;
2. Penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan pengkajian dan penginderaan strategis;
3. Penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategi nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional yang selanjutnya disebut Kirstranas, Telstranas dan Apstranas;
4. Perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala; dan
5. Perumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan.

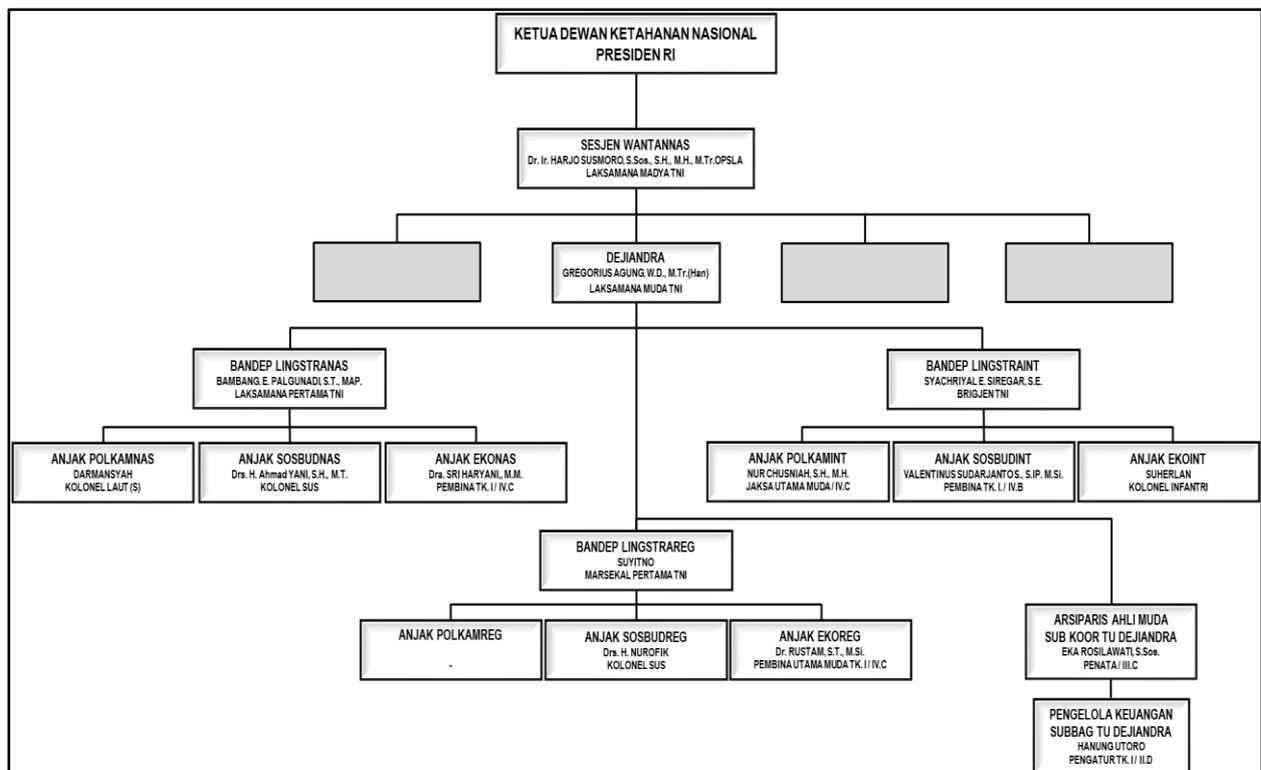
2.4 Struktur Unit Kerja

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mencapai sasaran yang direncanakan, penyelenggaraan kegiatan Dejiandra dilaksanakan oleh 3 (tiga) Pembantu Deputi (Bandep), yaitu:

1. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut Bandep Lingstranas, membawahi 3 Analis Kebijakan (Anjak), yaitu:
 - a. Anjak Bidang Politik Keamanan Nasional;
 - b. Anjak Bidang Ekonomi Nasional; dan
 - c. Anjak Bidang Sosial Budaya Nasional.
2. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional, yang selanjutnya disebut Bandep Lingstrareg, membawahi 3 Analis Kebijakan (Anjak), yaitu:

- a. Anjak Bidang Politik Keamanan Regional;
 - b. Anjak Bidang Ekonomi Regional; dan
 - c. Anjak Bidang Sosial Budaya Regional.
3. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional, yang selanjutnya disebut Bandep Lingstraint, membawahi 3 Anjak Kebijakan (Anjak), yaitu:
- a. Anjak Bidang Politik Keamanan Internasional;
 - b. Anjak Bidang Ekonomi Internasional; dan
 - c. Anjak Bidang Sosial Budaya Internasional.

STRUKTUR ORGANISASI KEDEPUTIAN JIANDRA



2.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Setiap organisasi mengalami proses berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Untuk mengetahui isu-isu penting bagi organisasi diperlukan analisis lingkungan strategis lingkup organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan ke depan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan

kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Analisis lingkungan dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

SWOT	HASIL PEMBAHASAN	
Strengths (Kekuatan)	1.	Dukungan dan kepercayaan masyarakat dan lembaga
	2.	Tugas dan fungsi Wantannas yang sangat strategis
	3.	Arahan Presiden tentang penguatan Wantannas untuk bela negara
	4.	Koordinator aksi nasional bela negara
	5.	Memiliki sistem informasi yang memadai
	6.	Memiliki kredibilitas dalam pengabdian sejak berdirinya NKRI
	7.	Kualitas SDM yang memadai
Weaknesses (Kelemahan)	1.	Pembinaan ketahanan nasional belum terukur
	2.	Belum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional
	3.	Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas sudah tidak relevan
	4.	Belum optimalnya koordinasi dengan ketua dan anggota Dewan
	5.	Manajemen kinerja yang belum optimal
	6.	Terbatasnya anggaran
	7.	Belum terealisasi pelaksanaan Sidang Dewan
	8.	Belum adanya Inspektorat
	9.	Belum adanya peraturan terkait Pedoman Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal
	10.	Jumlah SDM yang belum memadai
Opportunities (Peluang)	1.	Belum adanya alat ukur tentang pembinaan ketahanan nasional
	2.	Negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis
	3.	Reformasi birokrasi terus berjalan untuk memperbaiki kualitas layanan publik
	4.	Koordinasi antar sektor dan antar daerah dalam pembangunan daerah
	5.	Desentralisasi dan otonomi daerah
	6.	Rencana perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional
	7.	RPJMN mengamanatkan adanya rencana aksi bela negara
Threats (Ancaman)	1.	Beberapa instansi pemerintah juga menyusun kajian rekomendasi kebijakan kepada Presiden

SWOT	HASIL PEMBAHASAN	
	2.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional belum disahkan
	3.	Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, pada pasal 65 menyebutkan bahwa tugas penelitian dan pengembangan beralih ke BRIN
	4.	Rencana Pemerintah yang akan membubarkan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dianggap in efisien.

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut, maka untuk menghadapi kondisi lingkungan strategis yang semakin kompleks baik secara internal maupun eskternal agar tujuan dan sasaran Dejiandra periode 2020-2024 dapat terwujud secara optimal maka hasil analisa SWOT tersebut dapat dimanfaatkan dengan memaksimalkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman atau risiko yang akan dihadapi Dejiandra, antara lain:

1. Merevisi Keppres 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
2. Merumuskan kembali sasaran strategis dan indikator kinerja Wantannas dan Setjen Wantannas disesuaikan dengan tupoksi, visi, dan misi Presiden;
3. Mempercepat pengesahan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional;
4. Mempercepat pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional, dengan menyelenggarakan Sidang Dewan;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan wantannas dan Setjen Wantannas; dan
7. Memperkuat pembinaan Ketahanan Nasional melalui penetapan kebijakan dan strategi, pengukuran dan pemantauan kondisi kehidupan dan pembangunan nasional serta aksi Bela Negara secara terstruktur, sistematis dan masif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Kehidupan nasional Indonesia dalam 5 tahun ke depan, diperkirakan akan diwarnai perubahan geopolitik dan geostrategi. Hal tersebut dapat berimplikasi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dari berbagai sektor yang meliputi di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, dan Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) baik eksternal maupun internal secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tataran lingkungan strategis eksternal terdapat perubahan jenis dan bentuk konflik yang dapat mempengaruhi kondisi domestik sebuah negara. Sementara pada tataran lingkungan strategis internal, kurang optimalnya pengelolaan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan dapat menimbulkan *insecurity*. Dinamika lingkungan strategis tersebut menunjukkan semakin kompleksnya hakikat, sifat, dan bentuk ancaman sehingga dibutuhkan keuletan dan ketangguhan untuk pengembangan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi dan mengatasi AGHT tersebut melalui kebijakan dan strategi yang terintegrasi dan tersinergi secara komprehensif dan holistik dari seluruh aspek kehidupan nasional.

Dari situasi dan kondisi tersebut guna mewujudkan penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional maka Setjen Wantannas, telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk memastikan keterlibatan Wantannas dalam menciptakan kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis. Dejiandra yang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas telah menyelenggarakan kegiatan pengamatan, evaluasi, analisis, perumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategi nasional, regional dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Pelaksanaan kegiatan pengamatan, evaluasi, analisis, perumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategi nasional, regional dan internasional yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas saran tindak untuk dijadikan bahan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi Wantannas, sehingga harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Sesuai dengan amanat Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), maka Renstra Deputi Jiandra memuat Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan output, target, alokasi pendanaan, dan indikator kinerja. Dengan demikian, Renstra Deputi Jiandra tahun 2020-2024 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja, RKA-KL, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dejiandra setiap tahunnya selama periode tahun 2020-2024.

2.2 VISI WANTANNAS

Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, Presiden menetapkan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**. Untuk mendukung visi tersebut Presiden menetapkan misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi berbagai instansi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden. Untuk itu perumusan visi dan misi Wantannas disusun dengan menyelaraskan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut **“Dewan Ketahanan Nasional yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Merujuk visi Wantannas tersebut, maka visi Dejiandra ***Menjadi unsur pembantu pimpinan yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam*** menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan peluang, kendala, serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

2.3 MISI WANTANNAS

Wantannas melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana lembaga Dewan Ketahanan Nasional.

2.4 TUJUAN WANTANNAS

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, Wantannas telah menetapkan beberapa tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketetapan kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka kelangsungan hidup bangsa dan negara;
2. Terselenggaranya kapasitas pelayanan kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien; dan
3. Terwujudnya ketetapan kebijakan dan strategi aksi Bela Negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk kelima tujuan tersebut di atas, dijelaskan dalam sasaran strategis.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Wantannas dan Setjen Wantannas, dan merupakan *outcome* dari semua program. Sasaran strategis ditujukan untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Wantannas menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong; dan
2. Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan sasaran strategis di atas, maka untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama: "Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong", terdapat indikator sebagai berikut:

1. Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan;
2. Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti;
3. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan;
4. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan; dan
5. Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi Bela Negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis kedua: “Terwujudnya Wantannas yang efektif dan efisien”, terdapat indikator sebagai berikut:

1. Indeks RB;
2. Nilai SAKIP;
3. Opini BPK; dan
4. Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan.

2.6 RENCANA STRATEGI DEPUTI PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Wantannas dari Dejiandra menetapkan tujuan untuk 5 (lima) tahun periode 2020-2024 yaitu:

1. Merumuskan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam dan luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka penyusunan pengkajian dan penginderaan strategis;
2. Menyelenggarakan pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional dan internasional, dan penyusunan Perkiraan Strategis Nasional (Kistranas), Telaahan Strategis Nasional (Telstranas), dan Rancangan Apresiasi Strategis Nasional (Apstranas);
3. Membantu Sesjen Wantannas dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan Setjen Wantannas.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran program Dejiandra yang akan dicapai adalah mendukung sasaran strategis di Wantannas.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dejiandra, maka arah kebijakan di bidang pengkajian dan penginderaan meningkatnya kualitas hasil kegiatan pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional dan internasional yang tertuang dalam kajian dinamis dan siklus penyusunan Perkiraan Strategis Nasional (Kistranas), Telaahan Strategis Nasional (Telstranas), dan rancangan Apresiasi Strategis Nasional (Apstranas).

Berdasarkan arah kebijakan Renstra Dejiandra maka strategi yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam dan luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka penyusunan pengkajian dan penginderaan strategis;
2. Pengamatan pengaruh dinamika lingkungan strategis nasional, regional dan internasional;
3. Penyelenggaraan kajian dan evaluasi serta analisis kecenderungan dinamika lingkungan strategis nasional, regional dan internasional;
4. Penyusunan naskah kajian dinamis dan naskah siklus

- a. Perkiraan Strategis Nasional (Kistranas)
- b. Apresiasi Strategis Nasional (Apstranas)
- c. Telaahan Strategis Nasional (Telstranas)

2.7 PERJANJIAN KINERJA 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : **Deputi Pengkajian dan Penginderaan**
Tahun Anggaran : **2021**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya kehandalan perumusan isu strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang pengkajian dan penginderaan	Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	80	Persen
		Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden	80	Persen
		Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden	85	Persen
2	Meningkatnya kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian siklis, dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) bidang pengkajian dan penginderaan	Jumlah Kistranas, Telstranas, dan Apstranas Lingkungan Strategis Nasional; Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Penginderaan; Dan Kajian Kerjasama Bidang Lingkungan Strategis Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional	6	Naskah
		Jumlah Kistranas, Telstranas, dan Apstranas Lingkungan Strategis Nasional; Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Penginderaan; Dan Kajian Kerjasama Bidang	6	Naskah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		Lingkungan Strategis Nasional Bidang Lingkungan Strategis Regional		
		Jumlah Rekomendasi Saran Kebijakan, Saran Tindak Strategi Penginderaan, Dan Kajian Kerjasama Bidang Lingkungan Strategis Internasional	5	Naskah
3	Meningkatnya validitas dan kehandalan kebijakan dan strategi bidang pengkajian dan penginderaan	Tingkat validitas dan kehandalan saran tindak (skala 1-100)	100	Persen
4	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	100	Persen

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengkajian dan Penginderaan: Rp.1.736.078.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang telah dicantumkan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja termasuk didalam sebuah Sistem Akuntabilitas Kinerja. Adapun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dejiandra 2021 ini merupakan penjabaran akuntabilitas atas realisasi kegiatan/kinerja dan anggaran dari Dejiandra yang meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Renstra Setjen Wantannas Tahun 2020-2024, serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Meningkatnya kehandalan perumusan isu strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang pengkajian dan penginderaan.

Capaian kinerja atas meningkatnya kehandalan perumusan isu strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang pengkajian dan penginderaan terlihat table dibawah ini:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Satuan (%)
1	Meningkatnya kehandalan perumusan isu strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional bidang pengkajian dan penginderaan	Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	80	105,88	persen
		Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden	80	105,88	persen

		Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden	80	105,88	persen
--	--	--	----	--------	--------

3.1.2 Meningkatnya kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional bidang pengkajian dan penginderaan

Capaian kinerja atas kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional bidang pengkajian dan penginderaan terlihat pada table di bawah ini:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
2	Meningkatnya kehandalan saran tindak kebijakan dan strategi nasional (kajian siklis, dinamis, perkiraan cepat, semiloka, dan kajilu) bidang pengkajian dan penginderaan	Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas Lingkungan Strategis Nasional; Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Penginderaan; Dan Kajian Kerjasama Bidang Lingkungan Strategis Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional	6	6	Naskah
		Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas Lingkungan Strategis Nasional; Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Penginderaan; Dan Kajian Kerjasama Bidang Lingkungan Strategis Nasional Bidang Lingkungan Strategis Regional	6	6	Naskah
		Jumlah Rekomendasi	5	6	Naskah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
		Saran Kebijakan, Saran Tindak Strategi Penginderaan, Dan Kajian Kerjasama Bidang Lingkungan Strategis Internasional			
	Jumlah		17	18	Naskah

3.1.3 Terlaksananya tugas tambahan dari Pimpinan

Capaian Unit Kerja Dejiandra dengan adanya tugas tambahan dari Pimpinan yang sifatnya lintas kedeputian atau bekerja sama dengan Tim dari Kedeputian lainnya terlihat pada table di bawah ini:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
3	Tugas tambahan (diluar Perjanjian Kinerja Tahun 2021)	Naskah Kajian Bahan Sidang Strategi Keamanan Nasional (SKN)	-	1	Naskah
		Naskah Kajian SKN: Strategi Memperkuat Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial	-	1	Naskah
		Naskah Kajian Rencana Kontijensi Menghadapi Krisis Energi, merupakan tugas tambahan berdasarkan perintah lisan dari Pimpinan	-	1	Naskah
	Jumlah			3	Naskah

Pencapaian kinerja pada tahun 2021 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai dalam Penetapan Kinerja tahun 2021. Adapun hasil capaian sasaran program ini terukur dari jumlah rumusan rancangan kebijakan dan strategi dalam bentuk naskah kajian siklis, dinamis, perkiraan cepat, dan kajian daerah yang dapat diselesaikan tepat waktu serta terselenggara secara optimal. Adapun dokumen yang telah dihasilkan sebagai berikut:

1. Kajian Siklis Perkiraan Strategi Nasional Tahun 2022
 - a. Perkiraan Strategi Nasional Tahun 2022 Bidang Ekososbud (Lingstranas).
 - b. Perkiraan Strategi Nasional Tahun 2022 Bidang Polhukam (Lingstrareg).
2. Kajian Siklis Apresiasi Strategi Nasional Tahun 2022.
 - a. Apresiasi Strategi Nasional Tahun 2022 Bidang Ekososbud (Lingstranas).
 - b. Apresiasi Strategi Nasional Tahun 2022 Bidang Polhukam (Lingstrareg).
3. Kirpat Optimalisasi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid -19 (Lingstraint)
4. Kajida Optimalisasi Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit dan Program Biodiesel Untuk Keamanan Nasional Bidang Ekonomi dan Energi (Lingstraint)
5. Kirpat Memangkas Lama Antrian Jemaah Haji Indonesia (Lingstrareg)
6. Kirpat Optimalisasi Pengawasan Bahan Dan Produk Tradisional, Fabrikasi Serta Inprovisasi Yang Berpotensi Digunakan Untuk Aksi Terorisme Dalam Rangka Ketahanan Nasional (Lingstraint)
7. Kirpat Optimalisasi Pengawasan Kinerja Perusahaan Asuransi BUMN Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional (Lingstranas)
8. Kajian Dinamis Akselerasi Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dalam Rangka Keamanan Nasional. Merupakan naskah bahan sidang Dewan Ketahanan Nasional. (Lingstraint)
9. OTS Akselerasi Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dalam Rangka Keamanan Nasional. (Lingstraint)
10. Kirpat Pemeliharaan Stabilitas Keamanan LCS Dalam Rangka Mendukung Keamanan Nasional. (Lingstranas)

11. Kajida tentang Pendayagunaan Sumber daya Alam dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Tol-Laut Untuk Pembangunan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia. (Lingstrareg)
12. Kirpat Strategi Menghadapi Pemanasan Global Bagi Pembangunan Nasional. (Lingstrareg)
13. Kajida Penanganan Kerawanan Sosial Di Provinsi Lampung Dan Provinsi Banten Untuk Memperkuat Investasi Inklusif Dan Ramah Lingkungan Dalam Rangka Mendukung Keamanan Nasional. (Lingstranas)
14. Kirpat Antisipasi Dampak Pembentukan Aliansi AUKUS Untuk Menjaga Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik Dalam Rangka Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional. (Lingstraint)
15. Kirpat Naskah Strategi Pemanfaatan Sumber-Sumber Energi Guna Mendukung Pembangunan Nasional. (Lingstrareg)
16. Kirpat Penguatan Usaha Pelayaran Nasional Dalam Persaingan Global Transportir Laut Guna Ketahanan Ekonomi Nasional. (Lingstranas)

Dari data tersebut diatas dapat dilihat jumlah hasil/output Dejiandra pada tahun 2021 sebanyak 18. Hasil ini melampaui target yang diperjanjikan yaitu 17. Dengan demikian Unit Kerja Dejiandra telah menghasilkan capaian output lebih dari 100% yaitu 105,88%.

Selain keberhasilan Unit Kerja Dejiandra dalam menyelesaikan tugas tersebut juga adanya tugas tambahan dari Pimpinan yang sifatnya lintas kedeputian atau bekerja sama dengan Tim dari Kedeputian lainnya, yaitu penyusunan:

1. Naskah Kajian Bahan Sidang Strategi Keamanan Nasional (SKN), merupakan tugas tambahan berdasarkan perintah lisan dari Pimpinan. (Lingstranas dan Lingstrareg).
2. Naskah Kajian SKN: Strategi Memperkuat Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial, merupakan tugas tambahan berdasarkan perintah lisan dari Pimpinan. (Lingstranas dan Lingstrareg).
3. Naskah Kajian Rencana Kontijensi Menghadapi Krisis Energi, merupakan tugas tambahan berdasarkan perintah lisan dari Pimpinan. (Lingstranas dan Lingstrareg).

Selanjutnya pencapaian atas akuntabilitas kinerja Setjen Wantannas periode 2018, 2019, dan 2020, mendapat nilai B pada tingkatan akuntabilitas kinerja, dan untuk nilai hasil evaluasi terlihat ada peningkatan pada nilai akuntabilitas Setjen Wantannas, pada tahun 2018 nilai yang diraih adalah 62,24 dan ada peningkatan pada tahun 2019 menjadi 64,58.

Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 65,43. Berikut terlampir tabel gambar nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah periode 2018, 2019 dan 2020.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Target			Realisasi		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perumusan kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis nasional	7	7	7	7	7	7
	Perumusan kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis regional	7	7	7	7	7	7
	Perumusan kebijakan dan strategi penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategis internasional	8	8	6	8	8	5

3.1.1 Meningkatnya validitas dan kehandalan kebijakan dan strategi bidang pengkajian dan penginderaan

Capaian kinerja atas validitas dan kehandalan kebijakan dan strategi bidang pengkajian dan penginderaan terlihat pada tabel di bawah ini:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
3	Meningkatnya validitas dan kehandalan kebijakan dan strategi bidang pengkajian dan penginderaan	Tingkat validitas dan kehandalan saran tindak (skala 1-100)	100	100

3.1.2 Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
4	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	Menguatnya kualitas pembinaan Bela Negara melalui rumusan kebijakan dan strategi	100	100

3.2 Realisasi Anggaran Deputi Pengkajian dan Penginderaan Tahun 2021

Pembantu Deputi Pengkajian dan Penginderaan	Anggaran			
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
Lingkungan Strategis Nasional	623.701.000	576.341.955	47.359.045	92,41%
Lingkungan Strategis Regional	623.721.000	564.288.260	59.432.740	90,47%
Lingkungan Strategis Internasional	488.656.000	474.447.026	14.208.974	97,09%
Total	1.736.078.000	1.615.077.241	121.000.759	93,03%

Berdasarkan Tabel Realisasi anggaran periode tahun 2020 diatas, Menjelaskan bahwa Deputi Pengkajian dan Penginderaan pada tahun 2020 mendapatkan Pagu sebesar Rp 1.736.078.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah). dengan realisasi sampai dengan akhir Desember sebesar Rp. 1.615.077.241,- (Satu milyar enam ratus lima belas juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 93,03%.

BAB IV

PENUTUP

LAKIP unit kerja Kedepuitan Bidang Pengkajian dan Penginderaan tahun 2021 ini menyajikan tentang pencapaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan. Dari uraian laporan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja unit kerja Kedepuitan Bidang Pengkajian dan Penginderaan dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2021. Hal ini terlihat dari target output yang tercapai sebesar 22 saran tindak kebijakan dan strategi nasional. Saran tindak yang ditindaklanjuti masih dalam proses pemantauan. Penyerapan anggaran sebesar 93,03% mencerminkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Dalam pelaksanaan kegiatan maupun anggaran masih ada kendala. Dukungan anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam kegiatan kajida dan narasumber rapat. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya kendala ini dapat diatasi sehingga tercapai kinerja yang lebih baik.

--0--